

Satgas MBG akan Dibentuk Pemkot Bandung untuk Meningkatkan Mutu

Category: News

16 Oktober 2025



Satgas MBG akan Dibentuk Pemkot Bandung untuk Meningkatkan Mutu

Prolite – Korban keracunan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya di Jawa Barat menjadi yang tertinggi hingga saat ini.

Oleh karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen meningkatkan mutu tata Kelola dan pelayanan MBG.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menggandeng para ahli gizi, mitra, serta Satuan Pelayaan Pangan dan Gizi

(SPPG) .

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin usai menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Jawa Barat dalam rangka peningkatan tata kelola MBG yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul, Bogor, pada Senin 13 Oktober 2025 kemarin.



Wakil Wali Kota Bandung, Erwin

"Kita semua harus menjaga agar tidak ada lagi kasus keracunan pada siswa-siswi. Distribusi makanan harus terkelola dengan baik, dan kualitasnya harus terus dijaga," ujar Erwin.

Erwin mengatakan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap kota dan kabupaten sebagai langkah nyata untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

"Semua daerah harus membentuk Satgas MBG, ini akan kita upayakan. Jangan sampai ada kasus keracunan lagi. Tingkatkan kualitas makanan dan pastikan distribusi menu gizi seimbang berjalan dengan baik. Saya yakin semua harus jalan bersama-sama," tambahnya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Bandung berencana mendorong penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan keamanan dan mutu makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah.

Kegiatan konsolidasi regional tersebut menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan Kepala SPPG, ahli gizi, mitra, serta pemerintah daerah untuk membangun pemahaman bersama dalam peningkatan mutu tata kelola program MBG.

Rapat di Sentul tersebut merupakan seri ketiga dari rangkaian konsolidasi regional setelah sebelumnya dilaksanakan di

Semarang (wilayah Jawa Tengah dan DIY) serta di Surabaya (wilayah Jawa Timur).

Dedi Mulyadi Usulkan MBG Diberhentikan Sementara, Usai 1500 Lebih Siswa di Jawa Barat Jadi Korban

Category: News

16 Oktober 2025



Dedi Mulyadi Usulkan MBG Diberhentikan Sementara, Usai 1500 Lebih Siswa di Jawa Barat Jadi Korban

Prolite – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berhentikan untuk

sementara di Jawa Barat.

Usulan tersebut bukan tana sebab, Gubernur Jabar melihat banyaknya korban siswa yang keracunan usai menyantap MBG yang dibagi melalui sekolah tersebut.

Karena banyaknya korban makan Dedi Mulyadi meminta untuk diberhentikan sementara untuk bisa dilakukan evaluasi.

Usulan itu ia sampaikan seusai rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Bogor, Senin (29/9/2025).

"Evaluasinya satu dihentikan sementara, yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh," kata Dedi kepada wartawan.

Kita semua tau bahwa korban dari MBG di beberapa daerah di Jawa Barat sudah banyak seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Garut sebanyak 299 siswa, Kabupaten Bandung Barat sebanyak siswa dan yang terahir di SMPN 3 Banjar sebanyak 68 siswa.

Menurut Gubernur Jawa Barat perlu diberhentikan sementara agar pemerintah daerah memiliki cukup ruang untuk meninjau kembali program yang di berikan pemerintah untuk para pelajar.

Peninjauan akan dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat untuk mekanisme program mulai dari aspek distribusi, pengawasan dapur, hingga standar bahan pangan yang digunakan.

Ia menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan keamanan makanan yang disajikan kepada siswa sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tersebut.

Meski demikian, Dedi mengakui bahwa keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat.

Ia masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) yang dikabarkan tengah digodok sebagai payung hukum baru bagi

pelaksanaan MBG.

"Kami menunggu keputusan pusat, karena program ini inisiatif nasional. Tapi untuk Jawa Barat, saya kira kita perlu jeda untuk membenahi hal-hal teknis," ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyiapkan pembentukan tim evaluasi khusus di tingkat provinsi.

Tim ini nantinya akan merumuskan sejumlah perbaikan, termasuk usulan agar guru tidak lagi mencicipi makanan sebelum disajikan kepada siswa.

Tugas itu, menurut Dedi, sebaiknya dilakukan oleh tim pemeriksa khusus yang memiliki kompetensi teknis.

310 Siswa Keracunan MBG, Polda Jawa Barat Terus Kawal Insiden Hingga Tuntas

Category: News

16 Oktober 2025



310 Siswa Keracunan MBG, Polda Jawa Barat Terus Kawal Insiden Hingga Tuntas

Prolite – Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagiakan pemerintah untuk seluruh siswa di Indonesia kembali terjadi.

Kali ini keracunan menimpa ratusan siswa dari berbagai jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Seluruh siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan MBG yang di bagi.

Hingga Senin (22/9), pukul WIB, jumlah korban sementara tercatat sebanyak 301 orang. Para korban merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Kami sangat khawatir dengan kondisi anak-anak kami. Semoga mereka segera pulih,” ujar salah seorang orang tua siswa yang anaknya menjadi korban keracunan.



Penanganan darurat dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di wilayah Kecamatan Cipongkor dan sekitarnya. Sebanyak 116 orang dirawat di Puskesmas Cipongkor, 13 orang mendapatkan penanganan medis di Bidan Desa Sirnagalih, 27 orang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin, 127 orang mendapatkan pertolongan pertama di Posko Kecamatan Cipongkor, dan 18 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Anugrah.

Hingga saat ini, korban masih terus berdatangan ke Posko Kecamatan Cipongkor, sehingga jumlah korban diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, ., M.H, membenarkan adanya peristiwa keracunan massal yang diduga dari menu MBG yang dikonsumsinya tersebut.

"Benar, hingga malam ini jumlah korban sementara sudah mencapai 301 orang. Kami masih terus melakukan pendataan karena korban terus berdatangan. Penanganan medis sudah disiapkan di beberapa titik, termasuk di puskesmas, rumah sakit, dan posko darurat. Polda Jabar bersama instansi terkait akan terus memantau dan memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan yang optimal," ujarnya pada Selasa (23/9).

Kombes Pol Hendra menambahkan, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, untuk menelusuri sumber makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan massal ini. Penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam untuk mengungkap penyebab pasti keracunan apakah dari menu MBG yang disantap atau dari makanan yang lain.

"Kami imbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Saat ini tim kesehatan fokus pada penanganan korban, sementara aparat Kepolisian akan membantu memastikan penyelidikan terkait penyebab dugaan keracunan ini berjalan

lancar dan transparan," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban masih berpotensi bertambah seiring dengan adanya laporan terbaru dari lapangan. Pihak kepolisian dan instansi terkait terus berupaya untuk memberikan penanganan terbaik kepada para korban dan mengungkap penyebab pasti dari keracunan massal ini.

Usai 657 Siswa Keracunan, Dapur MBG Ditutup Sementara untuk Penyelidikan

Category: News

16 Oktober 2025



Usai 657 Siswa Keracunan, Dapur MBG Ditutup Sementara untuk Penyelidikan

Prolite – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah terlaksana di beberapa sekolah di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya tersebut banyak juga terjadi masalah salah satunya keracunan.

Baru-baru ini terjadi keracunan MBG di Jawa Barat tepatnya di Garut sebanyak 657 siswa diduga keracunan usai santap menu Makan Bergizi Gratis yang dibagikan.

Usai kejadian yang mengakibatkan ratusan siswa harus mendapatkan perawatan dapur penyedia menu MBG di tutup sementara.

“Ya, di-pending itu kan berarti ditutup sementara,” kata Bupati Garut Jawa Barat Abdusy Syakur Amin, kepada wartawan di Garut, dikutip dari Antara, Senin (22/9).



TribunJabar

Ia mengatakan kewenangan program MBG tersebut sepenuhnya ada di Badan Gizi Nasional (BGN). Sedangkan daerah merupakan penerima manfaat dari program tersebut.

Dengan adanya insiden itu, kata dia, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kadungora, yang sajinya dikonsumsi siswa tersebut, untuk sementara tidak beroperasi dulu sambil menunggu hasil uji laboratorium.

“Itu kan ranahnya BGN, jadi semua mulai dari izin pendirian, kemudian juga pengawasan, itu sampai saat ini masih dikontrol oleh BGN,” katanya.

Begitu juga tim Dinkes Garut, kata dia, sudah melakukan uji sampel makanan yang disajikan dalam menu MBG tersebut untuk

mengetahui penyebab keracunannya. Juga belum bisa diduga-duga faktor penyebabnya.

Kita semua tau bahwa program tambahan makan bergizi ini dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat khususnya anak-anak di sekolah.

Namun karena banyaknya korban yang diduga mengalami keracunan aka dari itu dapur penyedia menu untuk anak sekolah ditutup, hingga menemukan apa penyebabnya.

Sebelumnya Dinkes Garut sudah mengambil sampel makanan untuk diuji laboratorium dan sudah menangani siswa yang mengalami gejala keracunan. Dari 657 orang, 19 di antaranya dirawat dan sudah pulih.

Kejadian itu berawal dari sejumlah siswa mengeluh sakit, seperti pusing, mual, dan muntah-muntah, setelah menyantap makanan yang disajikan di sekolahnya, yakni MA Maarif Cilageni, SMA Siti Aisyah, dan SMP Siti Aisyah, kemudian SDN 2 Mandalaasari di Kecamatan Kadungora pada Selasa (16/9).

MBG, Ledia Beri 4 Catatan Dari Efisiensi Jumlah Hingga Pengelolaan Sampah

Category: Politik & Parlemen
16 Oktober 2025



MBG, Ledia Beri 4 Catatan Dari Efisiensi Jumlah Hingga Pengelolaan Sampah

Prolite – Di masa reses, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Hasil kunjungan dan serap aspirasi tersebut dirangkum Ledia dalam empat catatan.

Pertama, dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah ini terungkap bahwa kebutuhan akan program MBG ini tidak merata keseluruhannya.

Ada sejumlah sekolah yang memang kondisi sebagian besar siswanya dari kalangan tidak mampu atau hampir semuanya tidak mampu. Yang memang kalau pagi-pagi mereka sulit untuk sarapan, tidak punya bekal, dan lain sebagainya. Maka sekolah ini tentu menjadi prioritas utama. Sementara ada sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu sehingga tidak begitu memerlukan program MBG.

"Mengingat pelaksanaan program ini membutuhkan dana sangat besar dan saat ini bahkan belum bisa menjangkau semua sekolah di seluruh Indonesia, maka diperlukan pendataan yang lebih jelas agar diperoleh informasi akurat mana-mana sekolah yang harus diprioritaskan menerima program MBG ini," kata anggota anggota Komisi X DPR RI ini.

Kedua, perlu efisiensi jumlah paket makanan, dengan tidak menyamaratakan jumlah paket makanan setiap hari. Sebab setiap sekolah umumnya sudah punya ukuran rata-rata berapa yang tidak hadir di sekolah dalam satu hari. Misalnya pada salah satu SMP yang dikunjungi, rata-rata ada 60 siswa dari 800 siswa tidak hadir setiap harinya. Namun selalu dikirim 800 paket makanan sesuai jumlah siswa sehingga ada kelebihan puluhan paket makanan setiap hari.

"Kalau sudah punya ukuran rata-rata ini, mungkin tidak harus dikirim 800 paket makanannya, bisa saja 750 cukup. Agar apa? Agar kita bisa melakukan efisiensi dan mencegah pemborosan. Efisiensi anggaran bisa terbukti dari sini. Bukan menyatakan efisiensi tetapi dengan cara dikurangi mutu atau kualitas produknya," saran aleg dapil Jawa Barat 1 ini pula.

Urusan kelebihan makanan ini bukan perkara remeh. Sebab kelebihan hingga puluhan paket makanan setiap hari tentu memiliki dampak anggaran yang cukup besar dalam hitungan bulan, semester hingga tahun.

"Karena di sini kita bicara program yang dibiayai oleh APBN, oleh dana dari pajak masyarakat juga, maka kasus kelebihan pengiriman makanan hingga berjumlah bukan sekedar satu dua tapi puluhan dan terjadi setiap hari tentu bertolak belakang dari semangat efisiensi," lugasnya.

Sebenarnya, lanjut Ledia, upaya meminimalisir kelebihan pengiriman ini memungkinkan terjadi kalau antara pihak sekolah dan dapur MBG bisa melakukan koordinasi.

"Makanan itu kan diantar siang ya, diolah sejak pagi. Bagi

yang dapurnya cukup dekat, masih dalam kisaran satu kecamatan misalnya, sekitar jam pagi kan sudah bisa dilaporkan, berapa siswa yang tidak hadir. Dari 800 siswa, yang tidak hadir 60 orang. Maka bisa dikirim 750 paket saja, masih ada lebih tapi tidak banyak. Masih memadailah gitu. Cuma orang suka berpikir ah repot, ribet kalau ada ganti-ganti jumlah tiap hari. Padahal lama-lama akan ketemu polanya, dan bisa diminimalisir kelebihan paket tidak lebih dari 10 misalnya. Pihak dapur yang terbiasa memegang beberapa sekolah tentu bisa mengatur hal ini.”

Ketiga, terkait dengan sampah sisa makanan. Tanpa menghitung kelebihan makanan saja, paket MBG ini setiap hari menyisakan sampah, seperti kulit buah, kotak bekas susu, serta sisa makanan yang tidak habis dimakan siswa. Satu dua hari masih aman, namun setelah berbilang pekan dan bulan beberapa sekolah mulai memiliki problem baru; pengelolaan sampah.

Aanggota Komisi X DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini lantas menceritakan curhat kepusingan sekolah soal cara pengelolaan sampah.

“Sampah diproduksi setiap hari padahal tidak semua wilayah punya sistem pengelolaan sampah yang baik dan cepat. Beberapa sekolah jadi curhat terkait PR baru soal pengelolaan sampah ini. Sekolah pada akhirnya memerlukan bantuan dalam hal pengelolaan sampah. Entah akan dimagotisasi, dikomposting, mau diapain juga itu sampah tentu harus disiapkan agar tidak menumpuk dan menjadi sumber masalah baru. Artinya, perlu koordinasi juga antara sekolah dan pihak terkait seperti RW dan Kelurahan.”

Terakhir, dari hasil pengamatan ini, perjalanan kunjungan kerja dan juga beberapa laporan yang masuk pada Komisi X DPR RI terungkap bahwa kebutuhan prioritas utama program MBG ini lebih nyata diperlukan pada daerah-daerah 3T.

“Daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu sungguh

sangat perlu diafirmasi agar percepatan ketercapaian gizi sehari-harinya itu bisa memadai. Angka kurang gizi, stunting, itu banyak ditemukan pada daerah 3T.”

Karena itu Ledia mengingatkan Pemerintah agar menempatkan prioritas program MBG ini utamanya pada daerah 3T disusul pada daerah lain dengan prioritas pemberian program bagi sekolah yang memiliki mayoritas siswa dari golongan masyarakat menengah ke bawah.

“Ini tentu memerlukan pendataan yang tepat agar program ini bisa benar-benar mendorong peningkatan gizi anak-anak Indonesia masa depan,” tutupnya.

Lokus SPPG Belum Maksimal, Bupati Bandung: Padahal Masyarakat Antusias

Category: Daerah
16 Oktober 2025



Kuota 361 Lokus SPPG, Baru Terealisasi 15 Titik

KAB BANDUNG, Prolite – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo.

Bupati Bandung juga menyampaikan aspirasinya, agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menentukan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.

Aspirasi tersebut bupati sampaikan saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mohammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.

“Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung yang sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani jiwa,” ungkap Bupati

Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Padahal, kata Kang DS, masyarakat Kabupaten Bandung menyambut baik, sangat antusias mendukung program MBG ini.

“Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?” tanya dia.



Karena menurutnya semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap bantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb juga siap membantu.

“Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton,” imbuh Kang DS.

Terlebih program MBG ini merupakan program yang tidak bisa ditawar-tawar lagi yang harus terealisasi tahun 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya. Bahkan akhir Desember 2025 ditargetkan sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

“Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa,” ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

"Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG," jelas Dindin.

Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sendiri sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan Inpres.

"Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan," ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.

"Secara bertahap sesuai arahan pa bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG," pungkas Dindin.

DPRD Jabar Berkomitmen Sukseskan Program Makanan Bergizi Gratis

Category: Daerah
16 Oktober 2025



DPRD Jabar Berkomitmen Sukseskan Program Makanan Bergizi Gratis

KABUOATEN BADNUNG, Prolite – Ketua DPRD Jabar, Dr. H. Buky Wibawa, bersama Wakil Bupati Bandung Terpilih, Ali Syakieb, menghadiri acara Tasyakur Dapur Makan Bergizi di SPPG Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Senin (17/2/2025).

Buky mengatakan, persiapan untuk Makan Bergizi Gratis sudah dalam tahapan optimal. Sehingga kebutuhan gizi untuk anak-anak sekolah bisa tercapai dengan baik.

“Ini merupakan salah satu langkah terbaik dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit seluruh Jabar perhitungan Badan Gizi Nasional sekitar 41 T,” ujar Ketua DPRD Jabar, Dr. H. Buky Wibawa, .

Di Bojongsoang, lanjut Buky, sudah ada dua dapur umum, dari DPRD Jabar belum melakukan evaluasi khusus tapi pihaknya akan terus memantau proses pelaksanaannya. Bersama Badan Gizi Nasional dan tim ahli disetiap dapur sudah bagus memenuhi unsur makanan Bergizi kandungan protein dan sebagainya sudah terpenuhi.

"Dapur makan bergizi merupakan wujud nyata dari kepedulian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan gizi masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa hal tersebut pun tentu sejalan dalam rangka mendukung program yang digagas oleh pemerintah pusat," katanya

dok

Program makan bergizi gratis, tambah Buky, merupakan fondasi penting untuk tumbuh kembang terutama bagi anak-anak serta Kesehatan dan beraktivitas bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya dapur makan bergizi ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses makanan yang sehat dan bergizi seimbang serta juga bisa menjadi Pusat edukasi dan informasi tentang gizi yang baik sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya gizi seimbang dan mampu menerapkan pola makan yang sehat.

dok

"Tentunya kami mengapresiasi kepada pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya dapur makan bergizi ini terima kasih atas kerja keras dedikasi dan semangat gotong royongnya, program makan bergizi gratis ini tidak semata-mata merupakan asupan kepada anak-anak, tetapi juga merupakan sarana edukasi untuk anak-anak bersosialisasi, kemudian berkomunikasi kemudian juga membentuk ekosistem perekonomian masyarakat," tuturnya.

Sehingga, ucap Buky, dari program ini maka tumbuh kembang

perekonomian di masyarakat juga terus ikut berkembang. Oleh karena itu, berdasarkan informasi Badan Gizi Nasional, dalam radius empat kilometer harus memberdayakan sumber bahan makanan yang berasal dari masyarakat.

"Memang untuk MBG ini membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi komitmen dari presiden kita adalah harus memperhatikan tubuh kembang anak-anak kita sehingga Indonesia nanti menuju Indonesia emas itu memiliki generasi yang sehat, yang kuat yang cerdas dan mampu bersaing dengan dunia internasional kita sambut baik program ini dengan pikiran pikiran positif," pungkasnya.

Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemkot Bandung Gelontorkan Anggaran Rp26 Miliar

Category: Daerah
16 Oktober 2025



Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemkot Gelontorkan Anggaran Rp26 Miliar

BANDUNG, Prolite – Sebanyak Rp 26 miliar anggaran Pemkot Bandung disediakan guna mendukung program makan bergizi gratis (BMG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung A Koswara, dana tersebut sudah tertuang di APBD Kota Bandung tahun 2025.

“Sudah kita siapkan, Insya Allah sudah ada ya. Walaupun belum ada hitungan pastinya. Tapi secara slot dalam anggaran APBD 2025 di kota Bandung Kami sudah menyiapkan Rp. 26 miliar untuk membantu program itu,” kata Koswara pada kegiatan Bandung Menjawab di Jalan Jawa Kota Bandung Jabar Selasa (21/1/2025).

Namun demikian, pihaknya belum mengetahui hitungan pastinya anggaran yang harus disiapkan untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Bandung selama satu tahun.

“Ia untuk satu tahun. Enggak ngambil, memang sudah disiapkan dalam perencanaannya Iya khusus,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemkot Bandung telah memperluas program makan gizi

gratis ke 5 kecamatan tambahan, yaitu Arcamanik, Antapani, Andir, Batununggal, dan Coblong.

Dengan penambahan ini, sebanyak siswa akan menerima makanan bergizi gratis, sehingga total penerima manfaat mencapai siswa.

Program ini didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang memastikan keamanan dan kualitas makanan. Setiap dapur penyedia makanan harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dan diawasi secara ketat.

PJ Wali Kota Bandung Bagikan Makan Bergizi Gratis di SDN 140 ARCAMANIK

Category: News

16 Oktober 2025



PJ Wali Kota Bandung Bagikan Makan Bergizi Gratis di SDN 140 ARCAMANIK

Prolite – Program makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka mulai dibagikan di beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kota Bandung.

Hari Senin (13/01) SDN 140 ARCAMANIK mulai dilakukan mendapatkan program makan bergizi gratis yang di buat oleh pemerintah.

Pelaksanaan program makan ini di awasi langsung oleh PJ Wali Kota Bandung A Koswara didampingi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Lurah Sukamiskin, Puskesmas Arcamanik, serta Dishub Kota Bandung.



Fitri Intan Sari-Prolitenews

Pelaksanaan program makan bergizi gratis tahap 2 ini didistribusikan kepada siswa yang mencangkup 7 wilayah.

Wilayah yang mendapatkan program tahap ke 2 ini meliputi yaitu Kecamatan Cicendo, Sukajadi, Andir, Antapani, Arcamanik, Bandung Kidul dan Kecamatan Coblong.

Total sekolah penerima manfaat yaitu 40 sekolah. Terdiri dari tahap 1 yaitu 9 SD dan 5 SMP. Sedangkan tahap 2 meliputi 1 TK, 21 SD dan 4 SMP.

“Saat ini total keseluruhan di Kota Bandung yang melaksanakan MBG siswa,” ujar Penjabat Wali Kota Bandung, A Koswara saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 140 Arcamanik, Senin 13 Januari 2025.

Ia berharap, para siswa sekolah mendapatkan perhatian dan fasilitas dari pemerintah. Pasalnya pemberian MBG ini telah dipastikan perhitungan gizinya.

"Anak-anak pasti senang dapat perhatian dan fasilitasi dari pemerintah, sehingga bisa belajar dengan asupan gizi yang sesuai. Karena semua dihitung kalori, nilai gizi, dipantau oleh ahli gizi," ungkapnya.

Salah satu siswa kelas 4 Alea Putri Rinaldi menjelaskan senang ada pembagian makan dari pemerintah.

"Senang ada makanan yang dibagikan oleh pemerintah buat kita, makanannya juga enak porsinya cukup buat saya", ungkap Alea.

Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Bertahap, Pemkot Bandung Monitoring

Category: Daerah
16 Oktober 2025



Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Bertahap,

Pemkot Bandung Monitoring

BANDUNG, Prolite – Hari pertama sekolah di tahun 2025, Pemkot Bandung melakukan monitoring makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah. Monitoring langsung dilakukan oleh Pj Wali Kota Bandung dan Komandan Lanud Husein Sastranegara dari dapur hingga distribusi ke beberapa sekolah dasar.

“Sesuai dengan program pemerintah pusat, kita monitor sesuai dengan dapur yang ada. Hari ini ada dua dapur yang melakukan distribusi melakukan makan bergizi gratis dari Danlanud dan dari Badan Pangan Nasional (BPN) itu di Sukajadi,” jelas Pj Wali Kota Bandung A Koswara, Senin (6/1/2025).

Untuk dapur BPN kata Koswara, mendistribusikan makan bergizi gratis itu ke 7 sekolah yakni tingkat SD 5 sekolah dan SMP 2 sekolah. Sedang dari dapur Lanud Husein Sastranegara 7 lokasi yakni untuk di tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Jadi satu dapur itu rata-rata paket untuk makanannya, seperti kita lihat tadi di SD Angkasa. Saya belum dapat info yang dari pak Dandim, mudah-mudahan hari ini juga sudah bisa beroperasi. Kalau dari jumlah siswa kita SD negeri dan swasta ada 479 sekolah, SMP negeri dan swasta ada 269 sekolah dengan jumlah siswa negeri swasta siswa,” paparnya.

Makan siang bergizi gratis ini disebut Koswara belum menyeluruh, berdasarkan informasi awal dari jumlah siswa baru 20% nya atau siswa yang mendapat makan bergizi gratis. Untuk pemilihan lokasi sendiri berdasarkan radius dari dapur.

“Karena distribusinya tidak boleh terlalu lama. Yang belum kebagian? bertahap ya, kami juga belum dapat juknis dari pemerintah pusat apa saja perannya pemerintah daerah tapi kami sudah siap-siap apabila itu diperlukan,” tegasnya

Ditempat yang sama Komandan Lanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian, S.E menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat yang ada di Lanud Husein

Sastranegara merupakan kolaborasi antara TNI Angkatan Udara dengan Badan Gizi Nasional.

"Seperti disampaikan bapak Pj Wali Kota tadi kita hari ini mendistribusikan kurang lebih paket makanan siang bergizi semoga kedepan kita bisa terus dan menambah penerima manfaat yang kita berikan. Untuk menu ada nasi, sayur, tahu, buah dan susu. Untuk gramasi sudah diukur oleh ahli gizi dan dapur SPPG di Lanud Husein kita dilengkapi satu orang ahli gizi yang akan menakar gizi kepada masing-masing anak jadi anak kelas 1,2,3 SD itu berbeda menunya ataupun gramasinya dengan kakak kelasnya," tegasnya.